

## **STUDI KASUS: EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM TAKESRA DAN KUKESRA PADA MASYARAKAT NON-IDT DI DESA DEMPET**

*Oleh:  
Masrukhin*

### **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi pelaksanaan Program Takesra dan Kukesra dalam peningkatan penanggulangan kemiskinan pada masyarakat desa non-IDT di desa Dempet. Untuk menemukan komponen dan atau aspek-aspek yang perlu mendapat perhatian. Sebagai bahan informasi perbaikan bagi pelaksana dan pengembang Program Takukesra (Tabungan Kredit Usaha Keluarga Sejahtera), berkaitan dengan: pengelolaan kegiatan kelompok Takukesra, pelaksanaan monitoring program, perkembangan kegiatan menabung, meminjam, menggunakan kredit, mengembalikan kredit dan membina kelompok usaha ekonomi produktif, dan kemampuan program dalam peningkatan penanggulangan kemiskinan di desa Dempet.

Penelitian evaluasi ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Lokasi penelitian berada di desa Dempet. Subyek penelitian adalah PLKB, KPP, Kepala Desa, PPKBD, sub PPKBD, dan peserta kelompok Takukesra desa Dempet diambil secara purposive. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara dan studi dokumentasi. Analisis deskriptif dilakukan dengan cara membandingkan kenyataan pelaksanaan Program Takukesra di lapangan dengan program yang seharusnya di laksanakan sebagai kriteria.

Hasil analisis dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan Program Takukesra di desa Dempet selama ini, belum dimanfaatkan oleh sebagian besar penduduk. Terlihat dari keluarga Pra KS 1.183 KK (69,96%) dan KS I 148 KK (8,75%), yang baru menjadi peserta Takesra dari Pra KS 1.062 KK dan KS I 72 KK. Peserta Kukesra 693 KK dari keluarga Pra KS. Pengelolaan kegiatan program Takukesra meliputi: pengorganisasian, pemantauan kegiatan usaha kelompok sasaran Takukesra dinyatakan rendah (27,77%). Sikap dan perilaku mereka yang terlibat, untuk petugas KPP dinyatakan tinggi (100%), PLKB dinyatakan sedang (72,22%), Kepala Desa, PPKBD, dan Sub PPKBD dinyatakan sedang (71,40%), dan peserta Takukesra dinyatakan sangat rendah (36,84%). Pemantauan kegiatan kelompok Takukesra dilaksanakan oleh BKKBN dan BNI dari tingkat desa sampai tingkat pusat. Monitoring masih terbatas pada sirkulasi keuangan, belum sampai pada kegiatan usaha ekonomi produktif peserta. Perkembangan kegiatan kelompok mengalami penurunan dan kenaikan, sebagian besar peserta Takesra termasuk penabung pasif dan belum memanfaatkan Kukesra. Kemampuan program Takukesra dalam penanggulangan kemiskinan di desa Dempet, belum berhasil, dan dinyatakan rendah (0,00%). Terlihat ada peningkatan keluarga miskin 1,02% dari 68,94% (1996-1997) menjadi 69,96% (1998-1999), juga belum ada kemandirian dalam usaha ekonomi produktif dan masih dilakukan secara perorangan.

## **Pendahuluan**

Kemiskinan merupakan masalah besar yang selalu dihadapi oleh berbagai negara di dunia, termasuk di Indonesia. Sebagai upaya penanggulangannya pemerintah telah melakukan berbagai macam program pemberdayaan, salah satunya adalah program Takukesra (Tabungan dan Kredit Usaha Keluarga Sejahtera), yang berdasarkan Inpres No.3 Tahun 1996. Dengan sasaran pokoknya adalah wanita yang merupakan salah satu potensi pembangunan nasional. Hal ini dapat dilihat dari jumlah *sex ratio* penduduk di desa Dempet antara laki-laki (3.179 orang) lebih kecil daripada perempuan (3.284 orang).

Program Takukesra telah dilaksanakan di desa Dempet sejak bulan Juni 1996 sampai sekarang, namun demikian belum menampakkan hasil sebagaimana yang diharapkan. Terlihat dari terjadinya variasi yang cukup besar dalam pelaksanaan program. Misalnya: (1) kesalahan *droping* dana Takesra sebesar Rp. 2.000,00 per orang untuk keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I sebagai dana pancingan. Dana yang ada sebagian besar dimanfaatkan oleh keluarga KS II, III, KS III+, (2) sistem managerial yang dilaksanakan belum efektif dikarenakan tidak sesuai dengan petunjuk operasional Takukesra yang ada, (3) sosialisasi program Takukesra yang belum mencapai kelompok masyarakat miskin yang ada, dikarenakan lemahnya dukungan program dari berbagai pihak yang terlibat dalam pelaksanaan program Takukesra, baik dari petugas PLKB, KPP, Kepala Desa, PPKBD, dan Sub PPKBD.

Melihat permasalahan yang muncul di atas, maka perlu adanya penelitian Eavaluasi Pelaksanaan Program Takukesra dalam Peningkatan Penanggulangan Kemiskinan pada Masyarakat Non-IDT di desa Dempet. Dengan harapan dapat memberikan rekomendasi kepada Kantor Menteri Kependudukan/BKKBN dan pihak-pihak pelaksana pembangunan keluarga sejahtera berdasarkan kegagalan dan keberhasilan dalam pelaksanaan program Takukesra.

## **Kajian Teori**

Masalah kemiskinan sering dipersepsikan sebagai kenestapaan (derita) hidup seseorang yang disebabkan kurangnya pemenuhan kebutuhan dasar atau kelangsungan hidup (*survival needs*). Bahkan antara kemiskinan, ketimpangan,

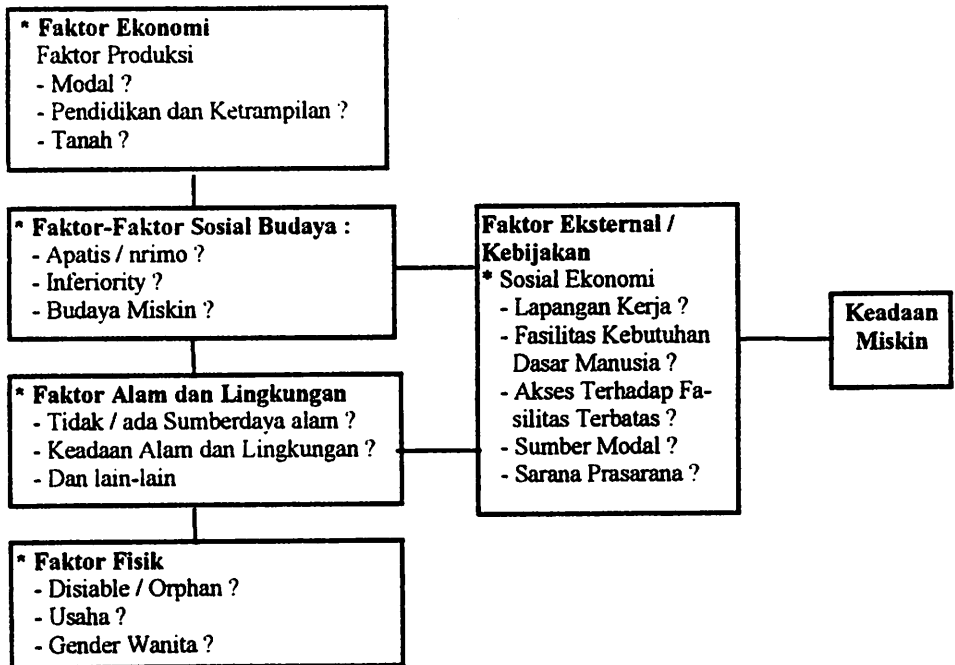
dan kesenjangan hidup disamakan. Padahal apabila dilihat dari penekanan arti kata masing-masing mempunyai arti yang berbeda. Kemiskinan (*poverty*) merupakan suatu kondisi kehidupan yang ditentukan dengan standart hidup secara absolut dari bagian masyarakat tertentu. Ketimpangan (*inequality*) yaitu suatu kondisi kehidupan yang ditentukan dengan standart hidup relatif dari bagian masyarakat tertentu. (Kuncoro, 1998: 103). Sedangkan kesenjangan adalah ketidakmerataan akses terhadap sumber ekonomis yang dimiliki, sebagai akibat dari ketidakmampuan Si miskin dalam persaingan secara ekonomi.

Konsep kemiskinan dari berbagai macam ahli pada dasarnya tidaklah jauh berbeda. Sebagaimana dikemukakan oleh Soedjadi (1998:27), kemiskinan merupakan situasi serba kekurangan yang terjadi bukan karena dikehendaki oleh Si miskin, melainkan karena tidak mampu menghindari keadaannya dengan kekuatan yang dimilikinya, ditandai oleh sikap dan tingkah laku yang menerima keadaan seakan-akan tidak dapat diubah. Hal ini nampak di dalam lemahnya motivasi (dorongan) kemauan untuk maju, rendahnya kualitas sumber daya manusia, lemahnya nilai tukar produksi, rendahnya produktifitas, terbatasnya modal yang dimiliki, rendahnya pendapatan, serta terbatasnya peluang (*opportunitiy*). Untuk berpartisipasi, dan memperoleh (*out come*) dalam pembangunan. Oleh karena itu, kemiskinan hendaknya dipandang sebagai suatu masalah yang kompleks atau *multi dimensional*. Untuk dapat mengetahui permasalahan kemiskinan, maka perlu mengidentifikasi, memahami konsep, dan faktor-faktor penyebabnya. Setelah itu baru menentukan pendekatan strategi dan kebijakannya. Sebagai upaya untuk menanggulangi kemiskinan yang ada dengan melakukan pengidentifikasian kemiskinan, maka diharapkan dapat menemukan permasalahan yang dihadapi. Pemahaman konsep kemiskinan dan faktor-faktor penyebabnya diharapkan dapat memahami kemiskinan secara menyeluruh tentang bentuk-bentuk kemiskinan, proses kemiskinan dan faktor-faktor penyebabnya. Sehingga mempermudah penentuan strategi dan kebijakan dalam penanggulangan kemiskinan secara tepat dan cepat. Menurut BKKBN keluarga dikatakan miskin dengan istilah Keluarga Pra-Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I dengan indikator-indikator sebagai berikut : **Keluarga Pra-Sejahtera** yaitu keluarga yang tidak memenuhi syarat-syarat keluarga sejahtera I, sedangkan **Keluarga Sejahtera I** yaitu (1) anggota keluarga menjalankan ibadah sesuai dengan

*Studi Kasus: Evaluasi Pelaksanaan Program Takesra dan Kukesra pada Masyarakat Non-IDT di Desa Dempet*

agamanya, (2) pada umumnya seluruh anggota keluarga makan dua kali sehari atau lebih, (3) seluruh keluarga memiliki pakaian yang berbeda untuk di rumah, bekerja/sekolah, dan bepergian, (4) bagian yang terluas dari lantai rumah bukan dari tanah, (5) bila anak sakit dibawa ke sarana/petugas kesehatan atau pengobatan modern. (BKKBN,1996 : 49). Untuk lebih mudahnya mengidentifikasi siapa yang miskin sebagai akibat dari permasalahan sosial, ekonomi, politik dan budaya, dapat digunakan beberapa indikator sebagai berikut (1) kemiskinan muncul karena ketidakadilan dalam faktor produksi masyarakat khususnya pemilikan tanah, (2) kemiskinan berkaitan dengan model pembangunan yang mengacu pada pertumbuhan, (3) deprivasi materil, yang diukur dari kurangnya pemenuhan kebutuhan pangan, sandang, kesehatan, papan dan kebutuhan dasar lain, (4) isolasi, seperti dicerminkan oleh lokasi geografisnya maupun oleh marginalisasi rumah tangga miskin secara sosial dan politik. Mereka sering tinggal di daerah terpencil, hampir tanpa sarana transportasi dan komunikasi, (5) alienasi, yaitu perasaan tidak punya kontrol atas diri sendiri. Ini timbul sebagai akibat isolasi dan hubungan sosial yang eksploitatif. Walaupun pembangunan berjalan seru dan menghasilkan teknologi baru, mereka tidak bisa ikut serta memanfaatkannya. Karena kekurangan kecakapan yang bisa dijual, (6) ketergantungan, inilah yang selama ini memerosotkan kemampuan si miskin untuk "*bargaining*" dalam dunia hubungan sosial yang timpang antara majikan dan buruh. Buruh tidak punya kemampuan untuk menetapkan upah, petani tidak bisa menetapkan harga hasil taninya, (7) ketidakmampuan membuat keputusan sendiri dan tiadanya kebebasan memilih produksi, konsumsi, dan kesempatan kerja, serta kurangnya perwakilan sosio-politik mereka. Hal ini tercermin dalam tidak adanya fleksibilitas dan kurangnya kesempatan bagi si miskin di desa, (8) kelangkaan aset membuat penduduk di desa bekerja dengan tingkat produktivitas yang sangat rendah, (9) kerentanan terhadap guncangan eksternal dan terhadap konflik-konflik sosial internal, juga berpengaruh terhadap status kemiskinan penduduk pedesaan. Kerentanan itu bisa disebabkan kondisi alamiah, perubahan pasar, kondisi kesehatan, dan lain-lain, (10) tidak adanya jaminan keamanan dari tindak kekerasan akibat status sosial rendah, karena lemah, karena faktor-faktor agama, ras, etnik, dan sebagainya (Mas`oed, 1994 : 133-134).

Untuk memahami faktor-faktor yang berpengaruh terhadap kemiskinan, proses kemiskinan, dan sebab-sebab kemiskinan secara internal dan eksternal, dapat dilihat pada gambar 1 di bawah ini.



**Gambar 1**  
Faktor-faktor internal dan eksternal kemiskinan

Sumber: Firdaus Mulya Carunia. (1994). *Analisis sosial ekonomi pertumbuhan dan dan perkembangan kota terhadap kemiskinan dan kesenjangan pendapatan masyarakat*. LIPI. P. 3-7.

Upaya Peningkatan Penanggulangan Kemiskinan yang dilakukan oleh pemerintah yaitu dengan pembangunan SDM yang berkualitas yaitu dengan memberikan pendidikan yang merata dan seluas-luasnya diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan ketrampilan yang memadai. Pengurangan

kepemilikan kekayaan, maka akan timbul pemerataan pendapatan bagi kaum si miskin berupa pajak-pajak kekayaan.

Untuk menanggulangi apa yang dialami oleh masyarakat miskin, maka perlu adanya kerjasama terpadu antara unsur-unsur yang terlibat. Sehingga penanggulangannya tidak bersifat segmental/sporadis. Baik di bidang ekonomi, sosial, politik, dan kultural. Kesehatan, pendidikan, dan modal bagi masyarakat sebagai penentu dalam aktifitas ekonomi produktif, sebab modal merupakan suatu komponen atau variabel yang dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi (Khairuddin, 1992 : 26). Oleh karena itu permodalan diutamakan bagi masyarakat miskin yang umumnya hidup di pedesaan. Di mana permodalan yang ada di desa terbatas jumlahnya (Maskun, 1994 : 21). Apabila pembangunan dilaksanakan secara segmental, maka orang yang miskin akan semakin miskin terpuruk dalam lingkaran setan kemiskinan. Oleh karena itu keterkaitan antara satu aspek dengan aspek lain secara terputus akan mencekik masyarakat miskin sehingga menjadi semakin miskin. Di sini nyata perlu adanya pemecahan masalah dengan pendekatan terpadu sektor-sektor lain (Daldjoeni, 1981 : 99).

Pemberdayaan dapat dilihat dari tiga sisi : (1) Pemberdayaan dengan menciptakan suasana yang memungkinkan potensi keluarga berkembang, (2) Pemberdayaan dilakukan untuk memperkuat potensi ekonomi atau daya yang dimiliki dalam rangka memperkuat pendidikan, kesehatan, modal, teknologi, informasi, lapangan kerja, dan pasar, (3) Pemberdayaan melalui pengembangan ekonomi keluarga yang berarti adanya kemitraan dan kebersamaan dalam usaha.

Heru Nugroho (1995), mengemukakan enam strategi pemberdayaan yang perlu diperhatikan (1) pemberdayaan masyarakat merupakan prasyarat mutlak bagi upaya penanggulangan kemiskinan, (2) setelah kesadaran kritis muncul, upaya-upaya memutuskan hubungan-hubungan yang bersifat eksploitatif terhadap lapisan orang miskin perlu dilakukan, (3) tanamkan rasa kesamaan (*egalitarian*) dan berikan gambaran bahwa kemiskinan bukan merupakan takdir tetapi sebagai penjelmaan konstruksi sosial, (4) merealisasi perumusan pembangunan dengan melibatkan masyarakat miskin secara penuh, (5) perlunya pembangunan sosial dan budaya bagi masyarakat miskin, (6) diperlukan redistribusi infrastruktur pembangunan yang merata.

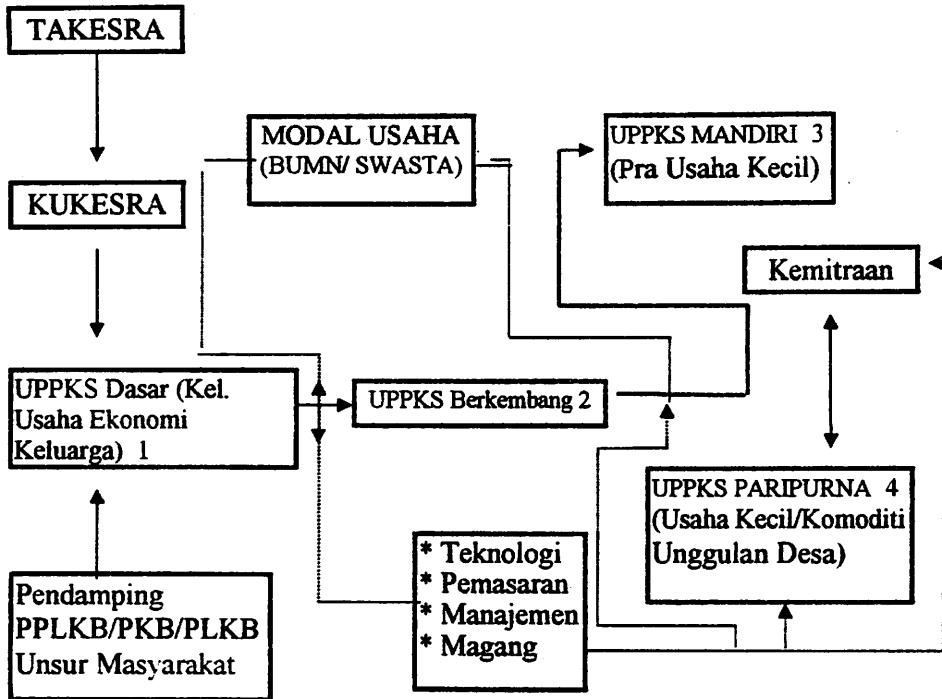
Peran wanita sebagai ibu rumah tangga tak dapat diremehkan bahkan harus mendapat wawasan baru sebagai salah satu aset pembangunan nasional. Kesempatan mendapat kedudukan yang sama bagi wanita Indonesia dalam kegiatan pembangunan ditegaskan dalam GBHN 1988 disebutkan:

”wanita, baik sebagai warga negara maupun sumber insani bagi pembangunan mempunyai hak, kewajiban, dan kesempatan yang sama dengan pria di segala bidang kehidupan bangsa dan dalam segala kegiatan pembangunan”.

(GBHN, 1988 : 162)

Untuk mewujudkan pembangunan keluarga sejahtera maka digulirkanlah Program Takukesra yaitu salah satu program yang berusaha mencoba menjangkau keluarga miskin dengan mengucurkan program kredit mikro untuk keluarga-keluarga miskin di daerah pedesaan. Program ini ditekankan pada wanita khususnya yang telah menjadi akseptor program KB yang tergabung dalam Kelompok UPPKS. Dengan 3 dasar falsafah yaitu (1) memberi ikan, (2) memberi kail, (3) memberi kail dan ikan. Tabungan Kesejahteraan Keluarga (Takesra) merupakan proses pendidikan untuk menumbuhkembangkan sikap gemar menabung, hemat, dan wawasan perencanaan ke depan. Pengembangan Usaha Kelompok Takukesra mengikuti pola pengembangan kelompok UPPKS dengan model usaha ekonomi keluarga yang diarahkan menjadi usaha kecil melalui pemberian bimbingan dan pembinaan bagi peningkatan kualitas SDM, pembinaan teknologi produksi untuk meningkatkan mutu hasil usaha, dan membantu hasil usaha. Sebagaimana terlihat dalam Gambar 2 di bawah ini.

*Studi Kasus: Evaluasi Pelaksanaan Program Takesra dan Kukesra pada Masyarakat Non-IDT di Desa Dempet*



**Gambar 2**  
 Model pengembangan usaha ekonomi Takukesra  
 Sumber: BKKBN, 1996, hal. 19

Monitoring merupakan proses pengukuran yang periodik dan rutin atas masukan-masukan, aktifitas-aktifitas, dan luaran-luaran program yang dilakukan selama pelaksanaan program berlangsung. Tujuan utama monitoring adalah menjelaskan sedini mungkin setiap kesalahan mengenai penyampaian masukan, pelaksanaan aktifitas atau produksi hasil luaran, supaya langkah-langkah koreksi dapat diambil tepat pada waktunya. Informasi tersebut diidentifikasi kelemahan-kelemahan program, ditentukan sebagai pemecahannya (Worthen & Sanders, 1973). Bagi program kemasyarakatan yang mempunyai waktu cukup lama, evaluasi ditujukan untuk mengetahui



keefektifan pelaksanaan program dalam jangka waktu yang telah berjalan dan hasil evaluasinya digambarkan sebagai umpan balik untuk mengetahui peningkatan dari program. Apakah ada umpan balik ketidaksamaan antara pelaksanaan program dengan perencanaan atau dengan standar tertentu.

### **Metode Penelitian**

Pendekatan penelitian ini adalah kualitatif naturalistik. Dengan mengambil tempat di desa Dempet kecamatan Dempet sebagai salah satu sampel kasus dari 30 desa yang ada, dikarenakan dari desa-desa di kecamatan Dempet memiliki karakteristik yang hampir sama.

Penentuan subjek penelitian peneliti membagi menjadi dua bagian : (a) jaringan informan utama (key informan) yang diwawancarai yaitu Kelompok Sasaran Takukesra, aparat pemerintah desa (Kepala Desa) dan Petugas Pembantu Keluarga Berencana Desa (PPKBD), Sub PPKBD, Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB), pihak Kantor Pos Pembantu (KPP), (b) jaringan informan pendukung yaitu tokoh masyarakat, orang yang berkepentingan terhadap program, orang yang berdomisili di wilayah penelitian, Pengawas Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PPLKB), orang yang berpendidikan lebih tinggi, dan situasi sosial berkaitan dengan kondisi saat pelaksanaan program Takukesra baik dari aspek waktu, kedisiplinan kerja, kinerja, ekonomis, dan sosial budaya.

Instrumen penelitian kualitatif adalah peneliti sendiri. Untuk menemukan data yang alami, maka peneliti menyatu dengan subyek penelitian. Sebagai bahan penilaian evaluasi pelaksanaan program Takukesra yang ada di desa Dempet, maka ditetapkan standar penilaian yang dikembangkan berdasarkan pendekatan gabungan yaitu pendekatan proses dan pendekatan *fidelity* (Said Hamid Hasan, 1988). Kemudian ditentukan kriteria komponen operasional beserta butir-butirnya. Selanjutnya dari kriteria bentuk operasional tersebut, komponen dinilai dengan metode penilaian (skoring) yang sesuai yaitu menetapkan khalayak sasaran, penampilan yang diukur (komponen), dan tolak ukur penampilan (kriterianya). Kriterianya didasarkan pada persentase sebagai berikut: (1) dinyatakan tinggi, apabila persentase = > 80% bentuk operasionalnya positif, (2) dinyatakan sedang, apabila persentase = < 80% - 60% bentuk operasionalnya positif, (3) dinyatakan rendah, apabila bentuk operasionalnya = < 60% atau kurang.

### *Studi Kasus: Evaluasi Pelaksanaan Program Takesra dan Kukesra pada Masyarakat Non-IDT di Desa Dempet*

Untuk menyimpulkan dan menafsirkan hasil penelitian, maka ditetapkan standar penilaian yang antara lain sebagai berikut: (1) sangat berhasil, apabila semua komponen pokoknya efektif, (2) berhasil, apabila 4-5 komponen pokoknya efektif, (3) kurang berhasil apabila 2-3 komponen pokoknya efektif, (4) Tidak berhasil, apabila komponen pokoknya 1 atau tidak ada komponen pokoknya yang efektif. Adapun komponen pokoknya yaitu : 1). Perilaku Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB), 2). Perilaku Petugas Kantor Pos Pembantu (KPP), 3). Perilaku Kepala Desa, Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa (PPKBD), Sub PPKBD, 4). Perilaku kelompok sasaran Program Takukesra dalam kehidupan sehari-hari, 5). Suasana kegiatan kelompok sasaran Takukesra, (6) Kemampuan Program Takukesra dalam peningkatan penanggulangan kemiskinan pada masyarakat non-IDT di desa Dempet. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian meliputi: pengamatan, dokumentasi, dan wawancara. Untuk memeriksa keabsahan data peneliti memperhatikan empat macam kualifikasi yaitu kepercayaan, keteralihan, kebergantungan, dan kepastian. Kredibilitas dilakukan dengan teknik sebagai berikut: (1) *perpanjangan keikutsertaan*, (2) *ketekunan pengamatan*, (3) *triangulasi*, (4) *pemeriksaan sejawat melalui diskusi*, (5) *kecukupan referensi*, (6) *kajian kasus negatif*, (7) *pengecekan anggota*. Sedangkan kebergantungan (*dependability*), dan kepastian (*confirmability*) dilakukan dengan teknik auditing, terhadap proses program Takukesra di desa Dempet, dan terhadap keberhasilan program berdasarkan catatan pelaksanaan keseluruhan proses dan hasil studi.

Analisis data dilakukan baik sewaktu mengumpulkan data maupun setelah pengumpulan data selesai. Analisis data meliputi kegiatan mengumpulkan data, manatanya, membaginya menjadi suatu pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari serta memutuskan apa yang akan di pelaporkan oleh peneliti. Analisis dilakukan dengan tahapan (1) analisis ranah, (2) analisis taksonomi, (3) analisis komponensial, (4) analisis tema.

### **Pembahasan**

#### **Kondisi Kehidupan Keluarga Pra Sejahtera Dan Keluarga Sejahtera I**

Berdasarkan data yang ada 1999 jumlah kepala keluarga ada 1.691 KK, yang dikelompokkan lima tahapan keluarga sejahtera: Pra KS sebanyak 1.138

KK (69,96%), KS I sebanyak 148 KK (8,75%), KS II sebanyak 11 KK (2,39%), KS III sebanyak 97 KK (5,74%), KS III + sebanyak 12 (0,71%).

Faktor-faktor utama yang menyebabkan masyarakat desa Dempet dikategorikan menjadi keluarga Pra Sejahtera yaitu bagian terluas dari lantai pemukiman yang mereka tempati berasal dari tanah. Sedangkan bagi Keluarga Sejahtera I faktor penyebabnya yaitu dalam hal agama yang mereka anut. masyarakat desa Dempet belum dapat melaksanakan ibadah ibadah secara teratur, seluruh anggota keluarga yang berusia 10-60 tahun belum bisa baca tulis, penghasilan anggota keluarga dari 15 tahun keatas belum punya penghasilan tetap, seluruh anaknya yang berumur 5-15 tahun ada yang tidak bersekolah di TK, SD, atau SMP.

### **Hasil Evaluasi Pelaksanaan Program Takukesra**

Berdasarkan komponen dan kriteria yang telah ditentukan, maka ditemukan beberapa nilai pelaksanaan Program Takukesra yang ada di desa Dempet sebagai berikut : Perilaku Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB), selaku petugas yang bertanggungjawab dalam melaksanakan Program Takuesra di desa Dempet Kecamatan Dempet, dapat dikategorikan dalam nilai sedang prosentase 72,22%. Dimana dari 36 butir terdapat 26 butir yang positif. Untuk perilaku petugas KPP yang melayani kegiatan Program Takukesra dan bertanggung jawab penuh dalam sirkulasi keuangan atau permodalan. KPP dalam hal bertugas dapat dikategorikan dengan nilai tinggi, yaitu dengan prosenatse 100%. Dimana dari 6 butir yang ada seluruhnya merupakan butir positif. Perilaku Kepala Desa, PPKBD, Sub PPKBD selaku ujung tombak dalam memasyarakatkan Program Takukesra di desa Dempet dapat dikategorikan dalam nilai sedang, dengan prosentase 71,4%, yaitu terdapat 5 butir positif dari 7 butir yang ada. Perilaku kelompok sasaran Program Takukesra dalam menanggapi, menerima, dan memanfaatkan Program Takukesra yang ada di desa Dempet, dapat dikategorikan pada nilai rendah, dengan prosentase 36,84%. Dimana terdapat 7 butir positif dari 19 butir yang ada. Kegiatan kelompok sasaran yang ada dalam mengikuti kegiatan Takukesra, baik itu berkaitan dengan menabung, meminjam, pengembalian kredit dan menggunakan kredit untuk usaha sebagai upaya peningkatan pendapatan, dapat dikategorikan pada nilai rendah. Dengan prosentase 27,77%. Dimana dari 36 butir yang ada terdapat 10 butir yang positif.

*Studi Kasus: Evaluasi Pelaksanaan Program Takesra dan Kukesra pada Masyarakat Non-IDT di Desa Dempet*

Pelaksanaan kegiatan monitoring pelaksanaan kegiatan Program Takukesra, dimulai dari ketua kelompok/Sub PPKBD/sampai BKKBN dan BNI pusat, berjalan baik sesuai dengan petunjuk operasional (mekanisme yang ada).

Pelaksanaan kegiatan peserta Takukesra dalam hal menabung, meminjam, menggunakan kredit, dan mengembalikan kredit, yang dilakukan oleh peserta Takukesra dilaksanakan dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari kinerja pihak PLKB, Kepala Desa, Sub PKBD, dan PPKBD yang ada. Pemantauan tersebut dapat dikatakan berjalan dengan lancar. Walaupun begitu ada sebagian kelompok/anggota yang menunggak. Untuk memantau kegiatan menabung, meminjam, mengembalikan kredit. Pihak BKKBN dan BNI dan kantor Pos telah membuat laporan perkembangan Takukesra yang ada. Perkembangan Takukesra yang ada, mengalami kembang kempis, baik dari jumlah peserta maupun saldo yang dimiliki.

Pemantauan kegiatan usaha ekonomi produktif kelompok sasaran masih belum dilaksanakan, pemantauan yang selama ini berjalan masih sebatas pada pelaporan sirkulasi keuangan. Kegiatan usaha ekonomi produktif pada umumnya dilakukan secara perorangan belum membentuk usaha secara bersama, baik dari produk, maupun jaringan pemasarannya. Dengan tidak adanya usaha ekonomi produktif secara bersama-sama inilah mengakibatkan pihak PLKB sulit menentukan kegiatan penyuluhan dan pembinaan.

Perkembangan pelaksanaan kegiatan Program Takukesra di desa Dempet selalu terlambat. Hal ini bisa dilihat dari pelaksanaan Program Takukesra pada tingkat Nasional. Untuk Kukesra seharusnya dilakukan pentahapan sebagai berikut : untuk putaran I (April 1996-Januari 1997), II (Agustus 1996-Mei 1997), III (Pebruari 1997-Desember 1997), IV (Oktober 1997-Agustus 1998). Akan tetapi dalam pelaksanaan Takukesra di desa Dempet, mulai dilaksanakan pada bulan Desember 1996 untuk putaran I. Sedangkan untuk saat sekarang ini baru pada putaran III.

Intensitas pelaksanaan Program Takukesra yang dilakukan di desa Dempet belum berhasil dalam hal peningkatan masyarakat untuk memanfaatkan Kukesra. Walaupun begitu masih adanya peningkatan jumlah nominal yang dipinjam, dan juga adanya peningkatan pengembalian kredit, dan penurunan jumlah penunggak merah. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 1 dan tabel 2 di bawah ini :

**Tabel 1**  
Perkembangan Takesra di Desa Dempet

No.	Bulan/Tahun	Jumlah		Jumlah Angg. Takesra		Saldo Akhir
		Kelompok		Pra KS	KS I	
1.	Maret 1997	44		989	73	Rp. 700.000,00
2.	April 1998	47		989	62	Rp. 354.000,00
3.	April 1999	52		1062	72	Rp. 4.350.300,00

Sumber : Data dari BKKBN Demak, 1999

**Tabel 2**  
Perkembangan Kukesra di Desa Dempet

No.	Bulan/Tahun	Jum Kel.	Jum. Angg.		Pinjaman	Angsuran	Sisa Pengemb.
			Pra KS	KS I			
1.	Maret 1997	5	62	8	1.400.000	400.000	1.000.000
2.	April 1998	38	889	-	17.070.000	10.000.000	7.070.000
3.	April 1999	31	693	-	29.660.000	14.967.500	14.692.500

Sumber : Data BKKBN Demak 1999

Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I masih banyak dijumpai di desa Dempet. Hal ini dapat dilihat pada tabel 3 di bawah ini:

**Tabel 3**  
Laporan Perkembangan Tahapan Keluarga Sejahtera di Desa Dempet

No.	Hasil Pendataan/ Jumlah KK	Keadaan Keluarga Sejahtera Saat ini													
		Pra Sejahtera				KS I				KS II		KS III		KS III+	
		AE.	Non AE.	Jml.	%	AE.	Non AE.	Jml.	%	Jml.	%	Jml.	%	Jml.	%
1.	1996-1997	312	695	1007	68,94	79	136	115	7,90	246	16,81	83	5,70	10	0,65
2.	1998-1999	323	860	1183	69,96	27	121	148	8,75	254	15,02	97	5,74	12	0,71

Sumber : Data BKKBN Demak 1999

Disamping data tersebut di atas juga adanya kenyataan kehidupan dari masyarakat di desa Dempet, yang sebagian besar bermata pencaharian sebagai buruh tani sebanyak 1.325 Orang. Sedangkan petani penggarap hanya ada 265 Orang. Untuk tahapan keluarga sasaran Program Takukesra di desa Dempet yang ada sekarang masih dalam keadaan seperti biasa, baik ada Program Takukesra maupun sebelum ada Program Takukesra.

Pelaksanaan program Takukesra yang ada di desa Dempet belum dilakukan secara terkoordinasi dalam penyuluhan dan pendidikan guna menumbuhkan ilmu pengetahuan dan ketrampilan, kesadaran menabung dan memanfaatkan Kukesra sebagai dukungan modal usaha ekonomi produktif. Terlihat pada tabel 3 ditemukan bahwa kemampuan pelaksanaan Program Takukesra dalam peningkatan penanggulangan kemiskinan, yang ada di desa Dempet dapat dikategorikan rendah sekali. Dengan prosentase 0.00%. Berdasarkan data pada tahun 1997 dan 1999, jumlah angka keluarga miskin semakin meningkat, untuk keluarga Pra KS sebanyak 68,94% (1997) menjadi 69,96% (1999). Jadi ada kenaikan angka kemiskinan sebesar 1,02%. Hal ini dapat dimaklumi pada sebagian besar kelompok sasaran Takukesra yang ada di desa Dempet belum tersentuh ataupun membuat mereka tertarik. Selama ini yang memanfaatkan Program Takukesra adalah kader Takukesra termasuk dalam kategori keluarga KS II, KS III, dan KS III +.

Dengan menelaah pelaksanaan Program Takukesra yang ada di desa Dempet, kecamatan Dempet, kabupaten Demak. Maka secara keseluruhan dapat dikategorikan kurang berhasil. Dimana dari 6 komponen yang ada, baru 3 komponen yang efektif. Adapun ketiga komponen tersebut adalah perilaku PLKB dalam melaksanakan tugas dikategorikan dalam (72,22%), perilaku petugas KPP (100%), Perilaku Kepala Desa, PPKBD, Sub PPKBD, (71,40%), tanggapan masyarakat terhadap Program Takukesra (36,84%), suasana kegiatan sasaran Takukesra (27,77%), dan kemampuan program Takukesra dalam penanggulangan kemiskinan di desa Dempet (0,00%).

### **Kesimpulan**

1. Pelaksanaan program Takukesra di desa Dempet, belum sepenuhnya dimanfaatkan oleh sebagian besar penduduk desa Dempet. Terlihat pada peserta Takesra dari keluarga Pra KS dan KS I terdiri dari 1183 KK (69,96%) dan 148 KK (8,75%). Sedangkan yang baru ikut sebagai peserta

Takukesra yaitu keluarga Pra Sejahtera I sebanyak 1.062 KK dan KS I sebanyak 72 KK.

2. Pengelolaan kegiatan kelompok sasaran Takukesra di desa Dempet yang telah dilakukan oleh petugas KPP, PLKB, PPKBD, Sub PPKBD dan Kepala Desa sebagai ujung tombak pelaksanaan Program dapat dikategorikan rendah dengan prosentase 27,77%, yaitu dari 36 butir terdapat 10 butir yang positif. Terlihat dari motivasi mereka dalam mendukung kegiatan program mulai dari perencanaan, pemberian fasilitas, pengarahan dan pengontrolan berjalan sendiri. Di samping itu pengetahuan tentang wawasan dunia usaha yang belum memadai mengakibatkan ketidakberhasilan dalam pengembangan usaha ekonomi produktif. Sedangkan mengenai perilaku pelayanan yang dilakukan oleh pihak pos pembantu (KPP) dilaksanakan dengan sangat tinggi, dengan prosentase 100%, dimana dari 6 butir yang ada, seluruhnya dinyatakan positif. Terlihat kesiapan dan keaktifan KPP dalam melayani kebutuhan peserta, baik berkaitan dengan menabung, mengajukan kredit maupun mengembalikan kredit. Untuk perilaku PLKB dinyatakan dalam kategori sedang dengan prosentase 72,22%, dimana dari 36 butir terdapat 26 butir yang positif. Perilaku Kepala Desa, PPKBD, Sub PPKBD dalam hal ini dinyatakan dalam kategori sedang, dengan prosentase 71,4%. Dimana dari 7 butir terdapat 5 butir yang positif. Perilaku kelompok sasaran Takukesra dalam menanggapi Program dapat dikategorikan sangat rendah, dengan prosentase 36,84%. Dimana dari 19 butir terdapat 7 butir yang positif.
3. Pemantauan (monitoring) kegiatan kelompok sasaran Takukesra dilaksanakan oleh BKKBN dan BNI mulai dari tingkat Desa sampai tingkat pusat. Namun pemantauan tersebut masih dalam bentuk sirkulasi tentang keuangan. Sedangkan pemantauan terhadap usaha ekonomi produktif anggota belum tersentuh.
4. Perkembangan kegiatan kelompok Takukesra di desa Dempet dalam menabung, dan meminjam mengalami penurunan dan kenaikan dari tahun ke tahun.
5. Kemampuan program Takukesra yang dilaksanakan di Desa Dempet dalam peningkatan penanggulangan kemiskinan belum manampakkan hasil. Terlihat dari keluarga Pra sejahtera dan Keluarga Sejahtera I yang belum memanfaatkan kredit sebagai modal usaha ekonomi produktif,

*Studi Kasus: Evaluasi Pelaksanaan Program Takesra dan Kukesra pada Masyarakat Non-IDT di Desa Dempet*

belum adanya peningkatan pengetahuan dan ketrampilan berkaitan dengan dunia usaha. Dengan demikian pelaksanaan Program Takukesra di desa Dempet dapat dikategorikan sangat rendah, dengan prosentase sebesar 0,00%. Dimana berdasarkan data 1997 dan 1999, angka kemiskinan di desa Dempet menunjukkan kenaikan 1,02%, yaitu dari 68,94% (1997) menjadi 69,96% (1999) dan dari 4 butir tidak ada yang positif.

**Rekomendasi**

1. Perlu diadakan pendidikan dan latihan (diklat) pemberdayaan masyarakat bagi kelompok Takukesra dan petugas pelaksana Program Takukesra. Untuk meningkatkan motivasi, pengetahuan, dan ketrampilan mereka.
2. Peningkatan kerjasama di antara berbagai pihak yang mendukung dengan kemitraan masyarakat yang berstatus sosial tinggi, sedang, dan rendah. Melibatkan berbagai potensi yang ada di masyarakat dalam program Takukesra.
3. Perlu penambahan pegawai baru yang secara khusus menangani Program Takukesra secara profesional, agar lebih konsentrasi.
4. Hasil pinjaman kredit yang telah didapat hendaknya dipergunakan sebagai usaha secara berkelompok, daripada digunakan untuk usaha perorangan.

**Daftar pustaka**

- BKKBN.(1996). *Pokok-Pokok Informasi tentang Takesra dan Kukesra*. Jakarta.
- BKKBN. (1997). *Petunjuk Pelaksanaan Takesra*. Jakarta.
- BKKBN. (1997). *Petunjuk Pelaksanaan Kukesra*. Jakarta.
- BKKBN. (1996). *Peta Informasi Kependudukan, Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera*. Jakarta.



- Djaljoeni, N.(1981). *Masalah Penduduk dalam Fakta dan Angka*. Alumni Bandung.
- Firdaus, Mulya, Karunia. (1994). *Analisis Sosial Ekonomi Pertumbuhan dan Perkembnagan Kota terhadap Kemiskinan dan Kesenjangan Pendapatan Masyarakat*. Jakarta : LIPI.
- Khairuddin. (1972). *Pembangunan Masyarakat*. Yogyakarta : Liberty, edisi kel.
- Kuncoro, Mudrajad. (1998). *Ekonomi Pembangunan, Teori, Masalah, dan Kebijakan*. Yogyakarta : UPPAMP YKPN.
- Maskun, H. Sumitro.(1974). *Pembangunan Masyarakat Desa, Asas Kebijaksanaan dan Manajemen*. Yogyakarta : Media Widya Mandala, Edisi ke III.
- Mochtar Masoe`d. (1994). *Politik dan Birokrasi Pembangunan di Indonesia*. Jakarta : LP3ES.
- Nugroho, Heru. (1995). "Kemiskinan, Ketimpangan dan Pemberdayaan" dalam Dewanto, Setyo, Awan, dkk. *Kemiskinan dan Kesenjangan di Indonesia*. Yogyakarta : Aditya Media.
- Soedjadi J.L. FX. (1998). *Manajemen Pembangunan*. No. 23 Th. VI Mei 1998. P. 27.
- Worthen, Blaim R. & Sanders, James R.(1973).*Educational Evaluation: Theory and Practice*. Worthington Ohio: Charles A. Jones Publishing Company.